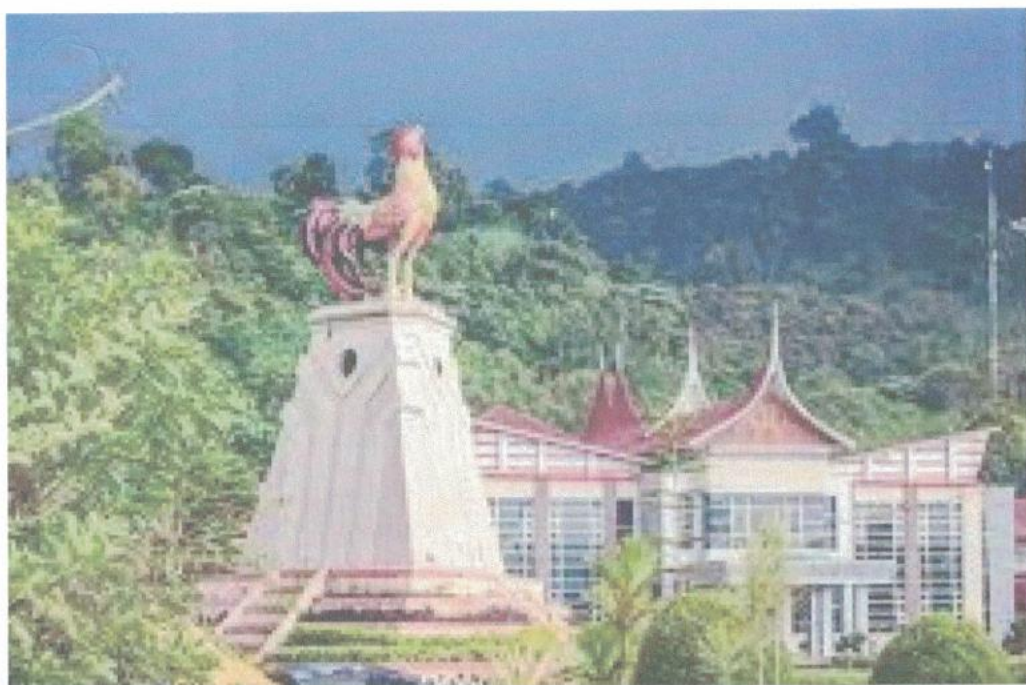




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayar
bangsa

PERUBAHAN RENCANA KERJA T.A 2025



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita semua, sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini. Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok kedepan.

Arosuka, 31 Juli 2025

KEPALA,



AFRIALDI, SE, MM

NIP. 19750429 199403 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN 2025	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Solok Tahun 2025.....	11
Tabel 2.2	Capaian Program Perangkat Daerah Sampai juni 2025	20
Tabel 3.1	Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2025	23
Tabel 3.2	Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia Tahun 2025	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya yang disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan perubahan terhadap dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan realisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan ke II. Dokumen Renja Perangkat Daerah mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunannya hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh perangkat daerah serta

dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok sebagai Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah mengacu kepada Program Nasional dan Propinsi Sumatera Barat dengan hubungan keterkaitan sebagai berikut:

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 mempedomani Misi No. 4 Kepala Daerah yaitu "Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih" dengan rincian:

Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran : Meningkatnya birokrasi yang Kapabel

Indikator : Indeks Profesionalitas ASN

Sedangkan sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, pada BAB VI tabel 6.3 Program prioritas yang pada BKPSDM adalah "Peningkatan Kualitas SDM ASN" sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tata Kelola Pemerintahan

Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
Keterangan : Pelatihan dan Diklat ASN, serta Beasiswa bagi ASN berprestasi

BKPSDM mempunyai hubungan fungsional dan profesional baik langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ada di pusat, maupun dengan kantor-kantor regional BKN yang tersebar pada dua belas wilayah kerja. Ada sebanyak 7 sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara yang secara keseluruhan masih terdapat permasalahan Pelayanan di BKPSDM sehingga Penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 diharapkan dapat mendorong pelayanan BKPSDM agar bisa sejalan dengan sasaran strategis BKN.

Selain itu BKPSDM juga memiliki hubungan fungsional dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan sasaran strategis BKD Propinsi Sumatera Barat "Meningkatnya kualitas pengelolaan Manajemen SDM Aparatur". Penyusunan perubahan rencana kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran strategis BKD Propinsi Sumatera Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Solok

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 selain dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Perubahan Kabupaten Solok Tahun 2025 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi juga sebagai panduan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. menjabarkan review rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaksanaan evaluasi terhadap Renja Tahun 2025 telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II (sampai dengan bulan Juni 2025) yang menggambarkan kinerja capaian masing-masing program pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hasil evaluasi terhadap RKPD akan menjadi acuan dalam menyusun tindak lanjut pada triwulan berikutnya, Dari hasil pelaksanaan evaluasi terhadap RKPD sampai dengan triwulan II, diperoleh permasalahan, faktor pendukung dan Upaya tindak lanjut urusan perangkat daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Capaian Renstra SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026. Strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RENJA tahun bersangkutan dan RPJMD 2021-2026 kabupaten Solok. Indikator kinerja yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya yang dapat memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Evaluasi Program Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok sebesar **Rp. 24.674.613.382,-** dengan realiasi keuangan sebesar **Rp. 2.390.044.459,00,-** (9,68%) dan realisasasi fisik sebesar **38,74%** yang terdi dari:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 22.401.776.141,- Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai (Termasuk Gaji PPPK dan CPNS), Tambahan Penghasilan ASN serta Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan realisasinya sebesar Rp. 1.719.411.381,- atau 7,67%.
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.025.438.498,- dengan realisasi sebesar Rp.662.752.078,- atau 32,72 %.
- c. Belanja Hibah sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0 %.
- d. Belanja Modal sebesar Rp. 97.398.743,- dengan realisasi sebesar Rp.7.881.000,- atau 8,09 %.

Adapun rincian target realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Indikator Kinerja Program adalah Persentase Penempatan Aparatur sesuai Kompetensi dengan target 75% dan capaian program sampai dengan triwulan II sebesar 37,63%. Sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Indikator Kinerja : Persentase Kesesuaian Formasi dengan ketersediaan PNS

Target: 100%

Realisasi Triwulan II: 49,67%

b. Mutasi dan Promosi ASN

Indikator Kinerja: Persentase kesesuaian Kompetensi dengan jabatan

Target: 80%

Realisasi Triwulan II: 48,33%

- c. Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian
Target: 100%
Realisasi Triwulan II: 10%
 - d. Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur
Indikator Kinerja: Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur
Target: 100%
Realisasi Triwulan II: 42,50%
2. Program Pengembangan Sumber Daya manusia
Indikator Kinerja Program adalah Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) dengan target 85% dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 25%. Sedangkan Indikator Kinerja untuk kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Indikator Kinerja: Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
Target: 100%
Realisasi Triwulan II: 25%
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator Kinerja Program adalah Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan dengan target 100% dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 53,60%. Sedangkan Indikator Kinerja untuk kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja: Cakupan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Target: 100%
Realisasi Triwulan II: 61,57%

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja: Cakupan dokumen keuangan yang tersedia
Target: 100%
Realisasi Triwulan II: 50,00%
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Kinerja: Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Target: 0%
Relisasi Triwulan II: 0%
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja: Persentase terlaksananya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
Target: 100%
Relisasi Triwulan II: 83,75%
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja: Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Target: 100%
Relisasi Triwulan II: 60%
- f. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja: Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik
Target: 100%
Relisasi Triwulan II: 66,25%

Untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel 2.1 dibawah ini (Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II)

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2025

NO	Saaran	Kode	Uraian / Bidang uraian Penerimaan daerah dan Program Anggaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang di evaluasi Tahun 2025	Realisasi capaian kinerja dan anggaran RPJMD yang di evaluasi Tahun 2025	Realisasi capaian kinerja dan anggaran RPJMD yang di evaluasi Tahun 2025	Target capaian kinerja dan anggaran RPJMD tahun 2025	Target capaian kinerja dan anggaran RPJMD tahun 2025	Target capaian kinerja dan anggaran RPJMD tahun 2025																																																																									
					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2025 Yang di evaluasi				I				II				III										IV																																																																								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	%	%	%																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	Saaran 1. Mengingatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	5.03.02	PROGRAM KEGIATAN DAERAH	Persentase Pemangkatan Aparatur sesuai kompetensi	75%	-	0,00%	4.312.840.201	75%	1.072.037.654	16,46%	88.828.219	22,69%	144.593.279	0,00%	-	0%	-	37,63%	343.038.640	-	-	14,47%	15,44%	100%	100%	BKPSDM																																																																								
		5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Kesesuaian Kompetensi Dengan Ketersediaan ASN	100%	-	0,00%	1.700.326.944	100%	443.813.042	19,17%	88.828.219	37%	93.833.388	0%	-	0%	-	48,87%	180.558.817	-	-	-	-	-	-																																																																									
		5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Keahlian, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengisian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Keahlian, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengisian ASN		718.841.928			20%	3.650.000	50%	2.100.000	0%	-	0%	-	70,00%	3.750.000																																																																																	
		5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Pelaksanaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan PNS dan PPPK		-			35%	68.308.780	35%	53.067.000	0%	-	0%	-	70,00%	121.373.760																																																																																	
		5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan pelaksanaan ASN		138.401.593			20%	4.761.100	20%	11.213.000	0%	-	0%	-	40,00%	15.974.100																																																																																	
		5.03.02.1.01.08	Feasibilitas Lumbaga Protes ASN	Jumlah Lumbaga Protes ASN yang Dikelas		300.000.000			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-																																																																																	
		5.03.02.1.01.10	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian		296.115.133			25%	4.378.055	41%	15.575.880	0%	-	0%	-	68,00%	18.791.935																																																																																	
		5.03.02.1.01.11	Pengembangan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Data Kepegawaian		169.168.290			15%	5.732.304	37%	12.077.518	0%	-	0%	-	52,00%	17.809.822																																																																																	
		5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan	80%	-	0%	2.020.380.240	80%	380.353.228	26,67%	81.650.338	21,67%	49.842.898	0,00%	-	0%	-	48,33%	131.502.224																																																																															
		5.03.02.1.02.01	Pengembangan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengisian Mutasi Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		408.631.286			30%	11.274.304	10%	5.602.318	0%	-	0%	-	45,00%	17.078.422																																																																																	
		5.03.02.1.02.02	Pengembangan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengembangan Kenaikan Pangkat ASN		346.883.556			25%	13.604.275	35%	39.634.250	0%	-	0%	-	60,00%	53.238.525																																																																																	

	5.03.02.1.02.03	Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Promosi ASN	1,264,874,987					25%	56,730,759	15%	4,406,318	0%	-	-	40,00%	61,187,077				
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	-	0%	82,927,000	100%	197,321,700	0,00%	-	0,10	2,980,000	0%	-	0%	-	10%	2,980,000		
	5.03.02.1.03.03	Pengembangan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-					0%		10%	-	0%	-	0%	-	10,00%	-			
	5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	82,927,000		0%	-	0%	2,980,000	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	2,980,000				
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peminatan terhadap Aparatur	100%	-	0%	509,016,117	100%	70,539,444	20,00%	9,957,304	22,50%	17,937,495	0,00%	-	0%	-	42,50%	27,894,799		
	5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	52,064,135		20%	1,385,000	11%	3,166,250	0%	-	0%	-	0%	-	31,00%	4,561,250				
	5.03.02.1.04.04	Pengembangan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	133,456,290		15%	740,000	25%	3,080,000	0%	-	0%	-	0%	-	44,00%	3,820,000				
	5.03.02.1.04.06	Pengembangan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	300,799,692		25%	7,822,304	20%	7,911,245	0%	-	0%	-	0%	-	45,00%	15,733,549				
	5.03.02.1.04.09	Pelaksanaan proses dan prosedur	Jumlah Dokumen Proses dan Prosedur Pegawai yang Diberikan	22,856,000		20%	-	30%	3,780,000	0%	-	0%	-	0%	-	50,00%	3,780,000				
2	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	85%	0	0%	5,242,600,107	85%	745,907,000	10%	20,154,275	0,00%	74,299,084	0,00%	0	0%	0	25,00%	94,453,359		
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	0	0%		100%	0	0%	0	0	-	0	-	0,00%	-				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan Pembangunan yang baik harus ada keselarasan antara capaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan yang mendukungnya. Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal ini mempedomani arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan Indikator Kinerja Sasaran serta Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026. Indikator kinerja sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Pagu Indikatif Penambahan RKPD
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF		
			APBD AWAL 2024	PAGU PENAMBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN
1	Persentase penempatan aparaturnya sesuai kompetensi	75%	1.072.037.454	1.072.037.454	0
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	85%	745.907.000	745.907.000	0
3	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	22.856.668.928	17.616.696.637,88	22.000.000
Jumlah			24.674.613.382	19.434.641091.88	22.000.000

Secara lengkap uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif dapat dilihat pada lampiran berikut ini

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET AKHIR TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2025	PRAKARAAN TARGET AKHIR TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGSA PENGAMAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKERJAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PEMANGKAT DAERAH PEMANGKUP JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PENCERITAS							
							SEBELUM	RPJPD 2025	RPJPD 2025	APBD 2025			Berimbang/Buruk	(15-12)	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	5.01.2.01.0005	NON URUSAN																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	14.114.302.712,00	
5	5.01.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	24.438.600.312,00	
5.01.2.01.0005		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX												</						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI RESTRUKTURISASI OPD 2025	PEKERJAAN CAPAIAN PENCAPAIAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDAMBAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKORAN MALI SENGANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENGANGKUTAN JANAB
							PAGU INDIKATIF (Rp)					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARJET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							TARGET 2025 SEBELUM	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BerdasarkanBerkasring (19+12)			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.03	5.03.01.2.06.0008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	Pengukuran Pelaksanaan dan Analisis Program Realisasi Anggaran																	
5.03	5.03.01.2.06.0009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06		KEPECAWAIAN	Pemantauan pelaksanaan dan sumber daya sumber daya pemerintah																	
5.03.01.2.06		Administrasi Kependudukan Peningkatan Kualitas																		
5.03.01.2.06.0010		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0011		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03	5.03.01.2.06.0012	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0013		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0014		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0015		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0016		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0017		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0018		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0019		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0020		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0021		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0022		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0023		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0024		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0025		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0026		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0027		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0028		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0029		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0030		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0031		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0032		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0033		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0034		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0035		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0036		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0037		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0038		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0039		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0040		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0041		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0042		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0043		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0044		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0045		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0046		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0047		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0048		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0049		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0050		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0051		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0052		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0053		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0054		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0055		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0056		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0057		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0058		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0059		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0060		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0061		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0062		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0063		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0064		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0065		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0066		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0067		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0068		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0069		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0070		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0071		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0072		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0073		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0074		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0075		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
5.03.01.2.06.0076		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														</				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / URUSAN / KEGIATAN / SUB URUSAN / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KINERJA / SUB URUSAN / KEGIATAN	TARGET AMBIEN RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2025	PRAKARSA CAPAIAN TARUHAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKARSA MALU SIKRANG TAHUN 2025		PESANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARJET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS					
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2025	APRIL 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Penilaian dan Perkembangan Kuantitas yang Ditentukan				3 Paket	2 Paket	0,00	25.368.750,00	7.880.000,00	7.880.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Teling Bawang Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyempurnakan sistem kode Perencanaan yang baik dan benar			53.344.300,00	BADAN KEPEKAWAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA
5		NON URUSAN							23.448.977.874,00	26.377.897.292,00	19.436.641.091,08	-4.064.336.982,12						24.438.693.312,00		
5.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03.01.2.06.0002		Pengadaan Perbaikan dan Peningkatan Kantor							23.448.977.874,00	26.377.897.292,00	19.436.641.091,08	-4.064.336.982,12						24.438.693.312,00		
5		URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03		KEPEKAWAHAN							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03.01.2.06.0004		Pengadaan Bawang Coklat dan Penggantian	Jumlah Paket Bawang Coklat dan Penggantian yang Diketahui				4 Paket	4 Paket	0,00	22.278.897,00	22.278.897,00	22.278.897,00	Kab. Sukoharjo Gunung Teling Bawang Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyempurnakan sistem kode Perencanaan yang baik dan benar		18.815.429,00	BADAN KEPEKAWAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA	
5		NON URUSAN							23.448.977.874,00	26.377.897.292,00	19.436.641.091,08	-4.064.336.982,12						24.438.693.312,00		
5.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03.01.2.06.0004		Pengadaan Bawang Coklat dan Penggantian							23.448.977.874,00	26.377.897.292,00	19.436.641.091,08	-4.064.336.982,12						24.438.693.312,00		
5		URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03		KEPEKAWAHAN							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03.01.2.06.0005		Pengadaan Bawang Coklat dan Penggantian	Jumlah Paket Bawang Coklat dan Penggantian yang Diketahui				6 Paket	3 Paket	0,00	5.051.183,00	5.051.183,00	5.051.183,00	Kab. Sukoharjo Gunung Teling Bawang Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyempurnakan sistem kode Perencanaan yang baik dan benar		8.845.272,00	BADAN KEPEKAWAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA	
5		NON URUSAN							23.448.977.874,00	26.377.897.292,00	19.436.641.091,08	-4.064.336.982,12						24.438.693.312,00		
5.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03.01.2.06.0005		Pengadaan Bawang Coklat dan Penggantian							23.448.977.874,00	26.377.897.292,00	19.436.641.091,08	-4.064.336.982,12						24.438.693.312,00		
5		URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03		KEPEKAWAHAN							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03.01.2.06.0006		Pengadaan Bawang Coklat dan Penggantian	Jumlah Laporan Pengembangan Rujukan yang Diketahui dari Rujukan SDPD				50 Laporan	1 Laporan	0,00	62.504.088,00	46.433.693,00	46.433.693,00	Kab. Sukoharjo Gunung Teling Bawang Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyempurnakan sistem kode Perencanaan yang baik dan benar		165.154.276,00	BADAN KEPEKAWAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA	
5		NON URUSAN							23.448.977.874,00	26.377.897.292,00	19.436.641.091,08	-4.064.336.982,12						24.438.693.312,00		
5.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03.01.2.06.0006		Pengadaan Bawang Coklat dan Penggantian							23.448.977.874,00	26.377.897.292,00	19.436.641.091,08	-4.064.336.982,12						24.438.693.312,00		
5		URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03		KEPEKAWAHAN							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03.01.2.06.0010		Pengadaan Bawang Coklat dan Penggantian	Jumlah Dokumen Pengembangan Rujukan yang Diketahui dari Rujukan SDPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukoharjo Gunung Teling Bawang Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyempurnakan sistem kode Perencanaan yang baik dan benar		24.315.025,00	BADAN KEPEKAWAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA	
5		NON URUSAN							23.448.977.874,00	26.377.897.292,00	19.436.641.091,08	-4.064.336.982,12						24.438.693.312,00		
5.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03.01.2.06.0010		Pengadaan Bawang Coklat dan Penggantian							23.448.977.874,00	26.377.897.292,00	19.436.641.091,08	-4.064.336.982,12						24.438.693.312,00		
5		URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.322.971.337,00	26.474.537.292,00	18.890.734.091,08	5.367.782.754,88						14.114.362.712,00		
5.03.01.2.06.0010		Pengadaan Bawang Coklat dan Penggantian							23.448.977.874,00	26.377.897.292,00	19.436.641.091,08	-4.064.336.982,12						24.438.693.312,00		

[illegible]

No	Kode	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PROSEDUR PENETAPAN OPD	REALISASI CAPAIAN KUALITAS TAHUN 2025	PRAKARAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	PAUJ INDIKATIF (Rp)				CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELUMPUCAN SASARAN	TARGET	PAUJ INDIKATIF (Rp)	PERENCANAAN TAHUN 2025		
							SEBELUM	TAHAP 2025	RUPD 2025	APBD 2025	INPO PERUBAHAN 2025	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	5.03	NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ZK	Aminah Gedung Kantor dan Bergambar Lainnya yang Capaian/Kelembutan	5	6	7	1 Unit	1 Unit	0,00	56.886.652,00	18.436.641.991,26	56.886.652,00	Kab. Sukoharjo, Gunung Tawang, Blang Bana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih 4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih	16	20	52.320.160,00	BADAN KEPEKAWANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0009	5	NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ZK	Aminah Gedung Kantor dan Bergambar Lainnya yang Capaian/Kelembutan	5	6	7	1 Unit	1 Unit	0,00	56.886.652,00	18.436.641.991,26	56.886.652,00	Kab. Sukoharjo, Gunung Tawang, Blang Bana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih 4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih	16	20	52.320.160,00	BADAN KEPEKAWANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0010	5	NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ZK	Aminah Gedung Kantor dan Bergambar Lainnya yang Capaian/Kelembutan	5	6	7	1 Unit	1 Unit	0,00	56.886.652,00	18.436.641.991,26	56.886.652,00	Kab. Sukoharjo, Gunung Tawang, Blang Bana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih 4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih	16	20	52.320.160,00	BADAN KEPEKAWANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0009	5	NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ZK	Aminah Gedung Kantor dan Bergambar Lainnya yang Capaian/Kelembutan	5	6	7	1 Unit	1 Unit	0,00	56.886.652,00	18.436.641.991,26	56.886.652,00	Kab. Sukoharjo, Gunung Tawang, Blang Bana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih 4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih	16	20	52.320.160,00	BADAN KEPEKAWANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	5	NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ZK	Aminah Gedung Kantor dan Bergambar Lainnya yang Capaian/Kelembutan	5	6	7	1 Unit	1 Unit	0,00	56.886.652,00	18.436.641.991,26	56.886.652,00	Kab. Sukoharjo, Gunung Tawang, Blang Bana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih 4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih	16	20	52.320.160,00	BADAN KEPEKAWANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0011	5	NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ZK	Aminah Gedung Kantor dan Bergambar Lainnya yang Capaian/Kelembutan	5	6	7	1 Unit	1 Unit	0,00	56.886.652,00	18.436.641.991,26	56.886.652,00	Kab. Sukoharjo, Gunung Tawang, Blang Bana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih 4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih	16	20	52.320.160,00	BADAN KEPEKAWANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0012	5	NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ZK	Aminah Gedung Kantor dan Bergambar Lainnya yang Capaian/Kelembutan	5	6	7	1 Unit	1 Unit	0,00	56.886.652,00	18.436.641.991,26	56.886.652,00	Kab. Sukoharjo, Gunung Tawang, Blang Bana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih 4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih	16	20	52.320.160,00	BADAN KEPEKAWANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0013	5	NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ZK	Aminah Gedung Kantor dan Bergambar Lainnya yang Capaian/Kelembutan	5	6	7	1 Unit	1 Unit	0,00	56.886.652,00	18.436.641.991,26	56.886.652,00	Kab. Sukoharjo, Gunung Tawang, Blang Bana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih 4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih	16	20	52.320.160,00	BADAN KEPEKAWANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0014	5	NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ZK	Aminah Gedung Kantor dan Bergambar Lainnya yang Capaian/Kelembutan	5	6	7	1 Unit	1 Unit	0,00	56.886.652,00	18.436.641.991,26	56.886.652,00	Kab. Sukoharjo, Gunung Tawang, Blang Bana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih 4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih	16	20	52.320.160,00	BADAN KEPEKAWANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0015	5	NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ZK	Aminah Gedung Kantor dan Bergambar Lainnya yang Capaian/Kelembutan	5	6	7	1 Unit	1 Unit	0,00	56.886.652,00	18.436.641.991,26	56.886.652,00	Kab. Sukoharjo, Gunung Tawang, Blang Bana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih 4. Menyenggarakan ata kode Pemerintahan yang baik dan bersih	16	20	52.320.160,00	BADAN KEPEKAWANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0016	5	NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ZK	Aminah Gedung Kantor dan Bergambar Lainnya yang Capaian/Kelembutan	5	6	7	1 Unit	1 Unit	0,00	56.886.652,00	18.436.641.991,26	56.886.652,00	Kab. Sukoharjo, Gunung Tawang, Blang Bana	DANA ALOKASI 						

No	KODE	URUSAN / INDIKATOR URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJAT AMIR RENOVASI REKRENTIA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAMIN 2023	PRAKORAN CAPAIAN TAMIN OPD TAMIN 2024	PAGU INDIKATE (Rp)					CAPAIAN ENERGI DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASMAN	PRABERAN MAJU RENCANA TAMIN 2025		PESAKAT DARI PEMERINTAH JAWAB
							SEBELUM		TARJAT 2025		APRIL 2025		RPOD PERUBAHAN 2025	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							8	9	10	11	12	13				14		15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Penyelidikan Peningkatan Kualitas ASN Peningkatan Kualitas ASN				9 Laporan	1 Laporan	276.727.500,00	40.771.772,00	38.951.772,00	-237.775.728,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			200.003.975,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Dokumen Proses dan Penerbitan Program yang Dilakukan				10 Dokumen	25 Dokumen	71.862.500,00	7.819.735,00	7.819.735,00	-64.046.760,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			72.345.425,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009	5.04.02.2.01.0009
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005
			Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	2.811.375.000,00	0,00	0,00	-2.811.375.000,00	Kab. Sukoharjo Gunung Tawang Banyuwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar 4. Meningkatkan kualitas ASN Peningkatan yang baik dan benar			2.811.343.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005	5.04.02.2.01.0005																	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Solok, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Solok.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil yang ditargetkan.

Mengingat akan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, akan ada potensi rencana kerja yang sudah tertuang ke dalam Dokumen Renja tidak dapat direalisasikan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi target capaiannya di kemudian hari. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang kedalam Renja, perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat sehingga hasilnya dapat sesuai dengan sasaran yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BKPSDM Kabupaten Solok.

Demikian Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat.

Arosuka, 31 Juli 2025
KEPALA



AFRIALDI, SE, MM
NIP. 19750429 199403 1 002